



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 Pelayanan Kepailitan



 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP)	Nomor SOP	0003/SOP-BHP/AHU/2014
	Tanggal Pembuatan	20 Januari 2014
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 Januari 2014
	Disahkan oleh	<p>Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,</p>  DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. NIP. 19581120 198810 1 001
Judul SOP	Pelayanan Kepailitan	

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang 3. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Hukum dan HAM RI; 5. Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Surat Edaran, Instruksi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas 2. Mengetahui tugas dan fungsi Balai 3. Menguasai Keterampilan Komputer 4. Menguasai Teknis penulisan dan analisa 5. Menguasai kemampuan berkomunikasi dengan baik
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Nomor Register SOP Pemanggilan SOP Pemanggilan SOP Pembayaran PNBPN	Komputer dan kelengkapannya Kamera Digital Digital Tape Recorder
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Standar Operasional Prosedur tidak dapat dijalankan tanpa adanya penetapan Pengadilan Niaga setempat	Buku Register BHP

SOP Pelayanan Pailit

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Ketua BHP	Sekretaris BHP	Anggota Teknis Hukum	Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah	Hakim Pengawas	Appraisal	Kelengkapan	Waktu		Output
1	menerima penetapan (pemohon) berdasarkan Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga kepada Ketua Balai Harta Peninggalan (BHP) selaku Kurator								Surat penetapan pengadilan	15 Menit	Berkas	
2	mendisposisikan permohonan kepada Sekretaris								Berkas	15 Menit	Disposisi Ketua	SOP pemberian Nomor Register
3	meneruskan disposisi Ketua kepada ATH								Berkas	15 Menit	Disposisi Sekretaris	
4	membuat konsep pengumuman kepailitan setelah mendapatkan penetapan pengumuman pailit dari hakim pengawas, disampaikan kepada Ketua BHP								Berkas	1 Jam	Berkas	
5	mengoreksi konsep pengumuman kepailitan. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada ATH untuk diumumkan di koran. Jika tidak setuju dikembalikan melalui ATH untuk diperbaiki oleh pemohon								Berkas	1 Jam	Berkas	
6	mengumumkan putusan kepailitan di koran nasional dan koran lokal serta Berita negara RI								Berkas	1 Hari	Surat Kabar dan Lembar Negara	SOP Publikasi
7	melakukan pencatatan boedel pailit setempat untuk disampaikan kepada hakim pengawas								Berkas	1 Hari	Pencatatan Boedel	
8	mengoreksi pencatatan boedel pailit. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada ATH untuk ditindaklanjuti. Jika tidak setuju dikembali kepada ATH untuk diperbaiki								Berkas	1 minggu	Berkas	
9	menugaskan Kepada Seksi Harta Peninggalan Wilayah untuk memanggil debitur dan para kreditor yang diketahui untuk melaksanakan rapat Kreditor pertama yang dipimpin oleh hakim pengawas								Berkas	1 Hari	Berkas	SOP Pemanggilan
10	melaksanakan rapat kreditor pertama dan menghasilkan daftar tagihan sementara. Hasil laporan disampaikan kepada Ketua BHP								Berkas	1 Hari	Rapat Para Kreditor	
11	menugaskan ATH bersama Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah untuk mempersiapkan rapat verifikasi								Berkas	1 Hari	Berkas	
12	ATH dan Seksi melaksanakan rapat verifikasi yang dipimpin oleh hakim pengawas, menghasilkan daftar tagihan kreditor tetap disampaikan kepada Ketua BHP								Berkas	1 Hari	Rapat Verifikasi	

13	mengoreksi laporan hasil rapat verifikasi. Jika setuju ditandatangani dan diteruskan kepada hakim pengawas untuk ditandatangani. Jika tidak setuju dikembalikan kepada ATH untuk diperbaiki	Ya					Berkas	1 Hari	surat permohonan ijin jual melalui penetapan pengadilan	
14	mengoreksi laporan hasil rapat verifikasi. Jika setuju ditandatangani dan diteruskan kepada ketua BHP. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Ketua BHP untuk diperbaiki				Tidak		Berkas	1 minggu	penilaian / penaksiran harga dari Appraisal	
15	menugaskan ATH untuk mengajukan proposal appraisal boedel pailit kepada hakim pengawas disertai dokumen penawaran						Berkas	1 Hari	surat permohonan ijin pelaksanaan penjualan	
16	menetapkan appraisal yang ditunjuk dengan melakukan pengambilan sumpah terlebih dahulu kepada appraisal						Berkas	3 Hari	Berkas	
17	melakukan penilaian boedel pailit didampingi ATH bersama Kasi HPW, hasilnya dituangkan dalam buku appraisal disampaikan kepada ketua BHP						Berkas	1 Hari	surat ijin pelaksanaan penjualan	
18	menugaskan ATH untuk membuat konsep surat permohonan lelang boedel pailit dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai data pendukung.						Berkas	15 Menit	Berkas	
19	menyusun konsep surat permohonan lelang boedel pailit dan menyerahkan kepada ketua BHP untuk dikoreksi.						Berkas	1 Hari	Berkas	
20	mengoreksi konsep surat permohonan. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada ATH untuk disampaikan kepada kantor lelang. Jika tidak setuju dikembalikan kepada ATH	Ya			Tidak		Berkas	1 Jam	Berkas	
21	mengumumkan jadwal lelang setelah mendapatkan persetujuan dari kantor lelang dengan membuat dan mengedarkan selebaran serta mengumumkan di surat kabar						Berkas	1 Hari	Berkas	
22	menghadiri pelaksanaan lelang, yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Lelang disampaikan kepada ketua BHP. Apabila pelaksanaan lelang tidak ada yang memasukkan penawaran/gagal maka dibuatkan konsep permohonan ijin jual kepada hakim pengawas untuk mendapatkan penetapan ijin jual di bawah tangan						Berkas	1 Hari	Berkas	SOP Lelang
23	menugaskan ATH membuat daftar pembagian tagihan tetap yang disetujui oleh hakim pengawas dan mengumumkan surat kabar nasional dan surat kabar lokal serta berita negara (dengan catatan pengumuman dilakukan disurat kabar yang sama pada waktu pengumuman kepailitan)						Berkas	1 Hari	Berkas	

24	mengumumkan daftar pembagian tagihan tetap di surat kabar nasional dan surat kabar lokal serta berita negara RI.								Berkas	1 Hari	Berkas	SOP Pembayaran PNBP
25	menyerahkan hasil pembagian kepada kreditor/pemohon setelah 14 hari pengumuman dikoran								Berkas	15 Menit	Dokumen	